



LAPORAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

ANGKATAN 1 TAHUN 2018

Penggunaan *Google Docs* Untuk Mewujudkan Kualitas Analisis Dan Evakuasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Yang Profesional, Tepat Waktu, Akuntabel, Dan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Dan Pengeditan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pada Lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Oleh :

YOSA JEREMIA DONOVAN, S.H., M.H.

NIP. 199110202018011002

PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR 1
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2018

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN AKTUALISASI LATSAR CPNS GOL.III ANGKATAN 1-2018

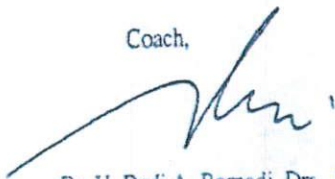
Judul : Penggunaan *Google Docs* untuk mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengeditan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang pada lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Nama : Yosa Jeremia Donovan, S.H.,M.H.
NIP : 199110202018011002
NDH : 04
Golongan/Pangkat : III-b/ Penata Muda Tingkat I
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Disetujui untuk diujikan dan telah diseminarkan dalam Evaluasi Seminar Pelaksanaan Aktualisasi dan Habitiasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 1, Lembaga Administrasi Negara (PKP2A1 LAN)

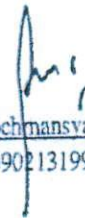
Jatinangor, 25 September 2018

Coach,



Dr. H. Dedi A. Barnadi, Drs., SH., M.Si
NIP. 195503171983011002

Mentor,



Rudi Rochmansyah, S.H.,M.H.
NIP.196902131993021001

Penguji,



Muhammad Afif Muttakin, S.Sos
NIP. 198604172009121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena atas berkat dan hikmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi ini. Laporan aktualisasi ini merupakan sebagai salah satu syarat dalam penilaian pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa pendidikan dan pelatihan dasar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan I Lembaga Administrasi Negara di Jatinangor (PKP2A I LAN Jatinangor) sampai pada pengerjaan aktualisasi dan pelaksanaan masa habituasi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan YME, atas berkat dan rahmat-NYA, sehingga laporan aktualisasi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak K. Johnson Rajaguguk, SH.,M.Hum selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI;
3. Yth. Bapak Rudi Rochmansyah, SH., MH selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan sekaligus sebagai Mentor Penulis, atas dukungan dan bimbingan nya selama ini kepada Penulis;
4. Yth. Ibu Poedji Poerwanti, SH.,MH selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, atas dukungan dan bimbingannya selama melaksanakan program aktualisasi kepada Penulis;
5. Yth. Bapak Dr. H.Dedi A. Barnadi, Drs., SH.,M.Si selaku *Coach* dari PKP2A I LAN Jatinangor yang selama ini sudah sangat membantu dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis;
6. Seluruh staff dan karyawan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun sangat memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis;
7. Seluruh staff dan karyawan di PKP2A I Lan Jatinangor yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun sangat membantu Penulis selama melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar CPNS di Jatinangor.
8. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dalam setiap langkah Penulis.
9. Loisa Veronica, yang telah mendukung dan ikut menemani setiap langkah karir yang Penulis jalani.
10. Seluruh teman-teman CPNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI termasuk seluruh CPNS Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, semoga kiranya kita selalu dilingkupi keberhasilan dalam setiap langkah yang kita pilih.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jatinangor, 25 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup Aktualisasi.....	2
BAB II BAGIAN ISI LAPORAN	3
A. Ideal Condition:	3
B. Existing Condition:	3
C. Gap Analisis.....	4
D. Peyelesaian Isu.....	4
E. Kegiatan	4
F. Kegiatan dan Tahapan Kegiatan	5
1. Minggu Pertama dan Kedua (25 Mei 2018 s.d. 8 Juni 2018).....	5
2. Minggu ketiga s.d. kedepalan (20 Juni 2018 s.d. 20 Juli 2018).....	7
3. Minggu kesembilan s.d. keduabelas (23 Juni 2018 s.d. 16 Agustus 2018).....	16
4. Minggu ketiga belas s.d. kelimabelas (20 Agustus 2018 s.d. 25 Agustus 2018).....	17
5. Minggu keempatbelas s.d. kelimabelas (27 Agustus s.d. 7 September 2018).....	18
6. Minggu keenambelas (12 September 2018).....	18
G. Monitori Kegiatan	20
H. Analisis Dampak	24
BAB III PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	25

LAMPIRAN.....	26
A. Dokumentasi Mentoring	26
B. Prosedur Manual Penggunaan Google Docs.....	28
C. Surat-Surat	32
D. Dokumentasi Coaching.....	40
E. Lembar <i>Coaching</i>	41
F. Output	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penulis menyusun prosedur manual penggunaan <i>google docs</i>	5
Gambar 2. Print out prosedur manual penggunaan <i>google docs</i>	6
Gambar 3. Undangan dan daftar hadir rapat pembahasan aktualisasi Penulis	7
Gambar 4. Laporan singkat rapat pembahasan aktualisasi Penulis	7
Gambar 5. Analis Hukum melakukan revisi Bab I dengan <i>google docs</i>	8
Gambar 6. Penulis memantau proses revisi revisi Bab I pada <i>google docs</i>	9
Gambar 7. Output revisi Bab I dengan <i>google docs</i>	9
Gambar 8. Penulis memantau proses revisi revisi Bab II pada <i>google docs</i>	10
Gambar 9. Analis Hukum melakukan revisi Bab II	10
Gambar 10. Output revisi Bab II dengan <i>google docs</i>	10
Gambar 11. Analis Hukum melakukan revisi Bab III dengan <i>google docs</i>	11
Gambar 12. Penulis memantau proses revisi revisi Bab III pada <i>google docs</i>	11
Gambar 13. Output revisi Bab III dengan <i>google docs</i>	12
Gambar 14. Analis Hukum melakukan revisi Bab IV dengan <i>google docs</i>	13
Gambar 15. Penulis memantau proses revisi revisi Bab IV pada <i>google docs</i>	13
Gambar 16. Output revisi Bab IV dengan <i>google docs</i>	14
Gambar 17. Analis Hukum melakukan revisi Bab V dengan <i>google docs</i>	15
Gambar 18. Output revisi Bab V dengan <i>google docs</i>	15
Gambar 19. Editor melakukan pengeditan draf buku dengan <i>google docs</i>	16
Gambar 20. Penulis membuat design halaman sampul Buku	17
Gambar 21. Penulis menggabungkan file design halaman sampul dengan file Buku	17
Gambar 22. Penulis menyusun Laporan Pelaksanaan Aktualisasi	18
Gambar 23. Penulis memegang dumi Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata	18

Gambar 24. Penulis melaksanakan rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Latsar CPNS bersama Para Analis Hukum dengan Mentor	19
Gambar 25. Undangan dan daftar hadir rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi CPNS Analis Hukum Puspanlak.....	19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "UU ASN"). Syarat yang perlu dipenuhi sebelum menjadi PNS adalah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut "CPNS"). Pada tahun 2017 telah dilaksanakan serangkaian seleksi untuk CPNS. Setelah itu, seluruh CPNS harus memenuhi syarat dengan mengikuti pendidikan dan latihan dasar (diklatsar) selama 1 (satu) tahun sebagaimana amanat UU ASN. Adapun tujuan dari diklatsar tersebut adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian UU ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS. Selain itu, Pelaksanaan diklatsar tersebut juga adalah demi tujuan menggapai fungsi pegawai ASN yang efektif dan efisien dalam pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Selanjutnya, CPNS yang telah mengikuti diklatsar diamanatkan membuat rancangan aktualisasi sebagai perwujudan implementasi nilai-nilai ASN yang telah dipelajari dari mata diklatlatsar tersebut ke dalam instansi masing-masing. Dalam Peraturan Kepala LAN RI No. 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III (selanjutnya disebut Perka LAN No. 21/2016) dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan tersebut dilakukan dengan metoda pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga harapannya setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tersebut, **diharapkan CPNS akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi (selanjutnya disebut "ANEKA") pada setiap kegiatan dalam tugas jabatannya.**

Penulis mengaktualisasikan kegiatan rancangan aktualisasi berdasarkan nilai ANEKA tersebut. Adapun kegiatan aktualisasi Penulis adalah terkait sebuah kendala pada tugas pokok dan fungsi memantau pelaksanaan undang-undang yang menurut Perancang Aktualisasi, hal tersebut membuat laporan hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang menjadi belum efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan pembuatan laporan, Perancang Aktualisasi sebagai Analis Hukum masih mengerjakan penyatuan data dan pengeditan dengan menggunakan *flashdisk* atau *e-mail* sedangkan dalam pengerjaanya aplikasi *word office* pada laptop masing-masing yang masih berbeda-beda versinya sehingga format laporan saat disatukan berubah, sehingga perlu untuk diedit kembali. Selain itu, hasil pengerjaan penyusunan dan pengeditan yang secara *offline* di laptop atau PC sangat rentan terserang virus komputer. Hal tersebut yang membuat Penulis menginisiasi solusi

dalam pengerjaan laporan hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang yang lebih efektif dan efisien, yaitu penggunaan aplikasi *google docs*.

Penulis telah mengaplikasikan aplikasi *google docs* sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Penulis. Hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi tersebut tertuang dalam laporan ini. Penulisan laporan aktualisasi ini kiranya dapat menjadi bukti penerapan nilai akuntabilitas sebagaimana salah satu penerapan nilai ANEKA yang telah diajarkan selama Latsar CPNS.

B. Tujuan

Kegiatan aktualisasi dan habituasi yang penulis lakukan bertujuan untuk mengefektifkan dan mempercepat kinerja dalam menyusun dan mengedit analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang pada Pupanlak UU BK DPR RI.

C. Ruang Lingkup Aktualisasi

Aktualisasi dilaksanakan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI pada tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

BAB II

BAGIAN ISI LAPORAN

A. Ideal Condition:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI. Tugas dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan undang-undang tersebut, diantaranya adalah **pemantauan pelaksanaan undang-undang**, pemantauan peraturan pelaksana undang-undang, dan dukungan penanganan perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Dalam melaksanakan tugas khususnya **pemantauan pelaksanaan undang-undang**, Puspanlak menyusun laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang, yakni berupa buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang.

Buku kajian, analisis, dan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini nantinya akan disampaikan kepada Anggota untuk menjadi dasar bagi Anggota untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari undang-undang yang dilakukan pemantauan. Tujuan dari adanya buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan keahlian kepada Anggota khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta **memberikan kemudahan** bagi Anggota dalam menjalankan fungsi pengawasannya tersebut.

Buku kajian, analisis, dan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini disusun oleh Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Pengerjaan dalam penyusunan buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang ini sebelum dilaksanakan aktualisasi Penulis disusun secara manual dengan *microsoft office* yang filenya berasal dari masing-masing individu Analis Hukum Puspanlak. Pengerjaan belum secara terintegrasi oleh setiap Analis Hukum, yang kemudian dalam pengerjaannya akan di bagi-bagi dari setiap Bab dalam buku tersebut dan kemudian disatukan. Pengerjaan dengan cara tersebut memang sudah cukup efektif, namun akan lebih efektif apabila dapat dikerjakan secara terintegrasi supaya pembahasan narasi setiap bab hasil pemantauan pelaksanaan undang menjadi lebih seragam.

B. Existing Condition:

Selama ini pengerjaan dalam penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang tidak dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan dalam pengerjaannya Analis Hukum masih sulit berintegrasi, karena beberapa alasan, antara lain:

1. Pemindahan data dan penyatuan data masih menggunakan *flashdisk* atau *email*.

2. Aplikasi *word office* pada laptop setiap Analis Hukum memiliki versi yang berbeda-beda
3. Penyatuan file data dari masing-masing *stakeholder* masih dengan cara *copy – paste* yang menyebabkan pengeditan dilakukan dengan waktu yang relatif cukup lama.
4. Terdapat perbedaan ruangan Analis Hukum sehingga dalam koordinasi penyatuan data maupun file masih cenderung memakan waktu yang lama.
5. Terkadang Analis Hukum juga ada dinas luar sehingga menyebabkan koordinasi penyatuan dan pengeditan data masih terkendala.

Berdasarkan alasan tersebut, dapat terlihat bahwa penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang selama ini belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehingga hal itu berimplikasi pada terhambatnya target pengerjaan.

C. Gap Analysis

Antara *ideal condition* dan *existing condition* terdapat gap atau jarak, antara lain:

Penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang yang masih kurang efektif dan efisien dikarenakan belum terintegrasinya pengerjaan penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh Analis Hukum Puspanlak UU.

D. Peyelesaian Isu

Pengerjaan hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang yang cepat akan sangat mengoptimalkan teraksananya visi dan misi Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI. Pengerjaan yang cepat untuk menyusun hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang adalah dengan menggunakan *google docs* supaya pengerjaan menjadi terintegrasi dan mudah dilihat perkembangannya. Selama ini pengerjaan hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang dilakukan secara manual menggunakan *Microsoft Word* dengan menyatukan dan mengolah data didapatkan dari pemangku kepentingan yang ada di pusat maupun daerah sehingga kurang efisien dari segi waktu dan kurang optimal dalam melakukan pengolahan data yang menghasilkan keseragaman bahasa dalam penyusunan bab I sampai dengan Bab V.

E. Kegiatan

Dengan adanya isu tersebut, penulis berinisiatif menggunakan salah satu aplikasi dari *google platforms*, yaitu *google docs*. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menyusun dan mengolah data seperti *microsoft word*, tetapi dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna (*user*) dalam satu *softfile*. Oleh karena itu, pengerjaan hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan menggunakan *google docs* akan menimbulkan pengerjaan secara terintegrasi antara setiap Analis Hukum Puspanlak

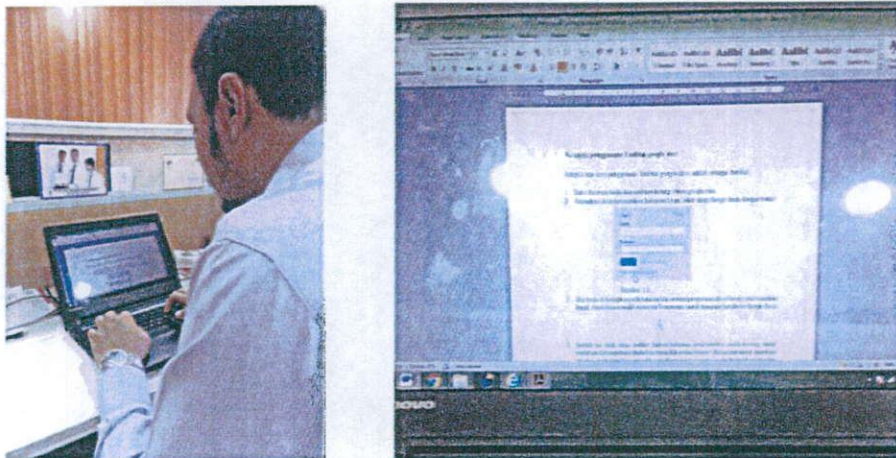
yang menjadi tim bab. Penggunaan *google docs* mulai digunakan pada pengerjaan pembuatan buku hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

F. Kegiatan dan Tahapan Kegiatan

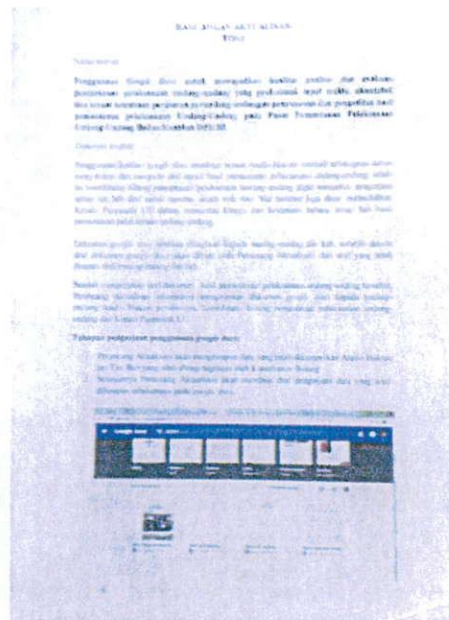
Kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi penggunaan *google docs* telah dilaksanakan dan menghasilkan *output* dan *outcome* untuk mendukung penyelesaian isu masih manualnya pengerjaan hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sehingga output hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang masih kurang efektif dan optimal. Adapun tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Minggu Pertama dan Kedua (25 Mei 2018 s.d. 8 Juni 2018)

Mengawali pelaksanaan aktualisasi penggunaan *google docs* untuk hasil kajian, analisis dan evaluasi undang-undang telah dilaksanakan terlebih dahulu penyusunan prosedur manual penggunaan *google docs*.



Gambar 1. Penulis menyusun prosedur manual penggunaan *google docs*.



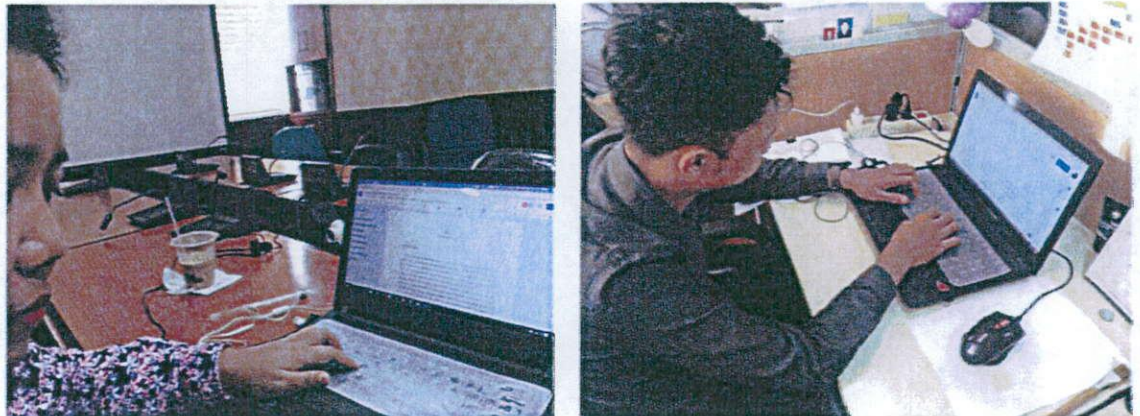
Gambar 2. Print out prosedur manual penggunaan google docs.

Selanjutnya telah dilaksanakan konsultasi dengan Kepala Puspanlak UU BK DPR RI, Korbid Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan seluruh Analis Hukum terkait penggunaan *google docs* tersebut. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan rapat pembahasan Aktualisasi CPNS Analis Hukum, sehingga mengaplikasikan nilai etika publik. Adanya pembuktian pada kegiatan ini baik melalui foto (gambar), surat undangan, daftar hadir, laporan, dan *output* yang telah dijalankan menggambarkan telah diterapkan nilai akuntabilitas. Selain itu, kegiatan konsultasi dengan Mentor akan memberikan petunjuk untuk Penulis dalam menjalankan kegiatan aktualisasi dengan baik dan terarah menggambarkan adanya nilai komitmen mutu, *whole of government*. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelaksanaan kegiatan aktualisasi sehingga menjadi wujud pelaksanaan tanggung jawab oleh Penulis bersama dengan Analis Hukum Puspanlak lainnya yang menggambarkan nilai anti korupsi dan manajemen ASN.

pelaksanaan UU Pariwisata, lalu sebagai penginput draf bab I sampai dengan bab V tersebut untuk kemudian memberikan perkembangan pengerjaan dengan menggunakan *google docs* kepada Kepala Puspanlak UU. Adapun rangkaian kegiatan minggu ketiga sampai dengan minggu kedelapan sebagai berikut:

a. Merevisi Bab I Buku Kajian, analisis dan evaluasi UU Pariwisata

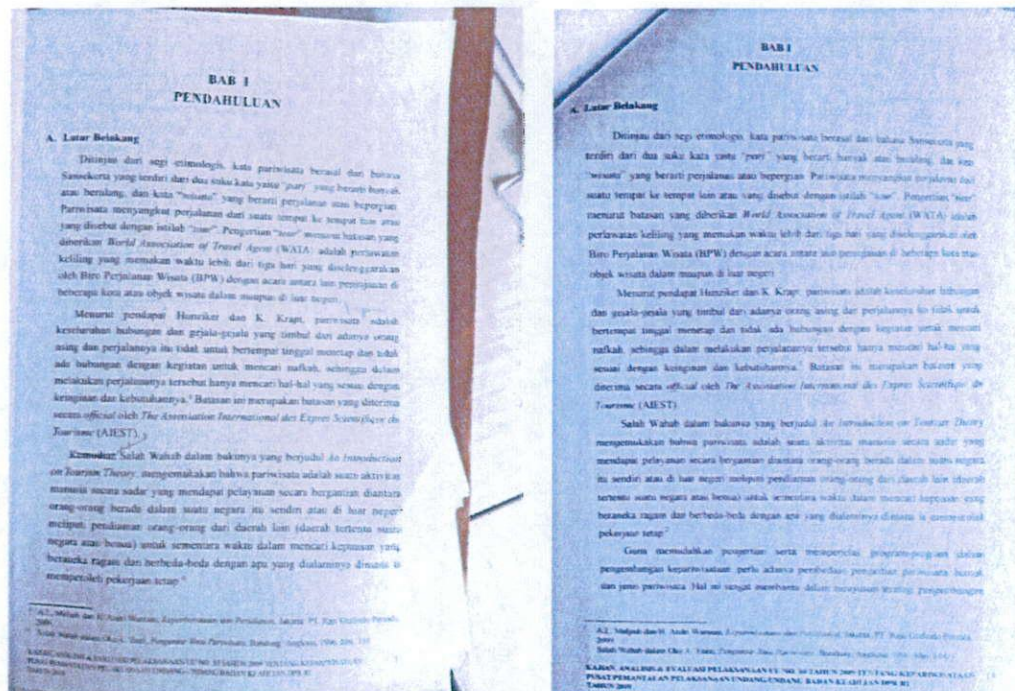
Kegiatan kedua yang Penulis lakukan adalah merevisi Bab I Buku Kajian, analisis dan evaluasi UU Pariwisata bersama Analis Hukum Puspanlak lainnya. Sebelumnya, Penulis meminta file Bab I dari Tim Bab I UU Pariwisata untuk diupload ke dalam aplikasi *google docs* dan untuk tahap koordinasi tersebut menggambarkan teraplikasi nilai etika publik, *whole of government* dan manajemen ASN. Setelah itu Penulis memantau pengerjaan dan perkembangan revisi Bab I pada aplikasi *google docs*, sehingga teraplikasi nilai pelayanan publik. Kegiatan pengerjaan secara terintegrasi tersebut memudahkan dan mempercepat pengerjaan Bab I sehingga menggambarkan nilai komitmen mutu. Pembuktian dengan gambar di bawah ini menggambarkan nilai akuntabilitas.



Gambar 5. Analis Hukum melakukan revisi Bab I dengan google docs



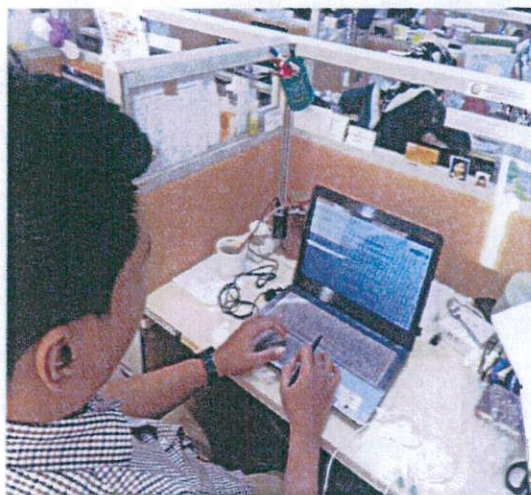
Gambar 6. Penulis memantau proses revisi revisi Bab I pada *google docs*



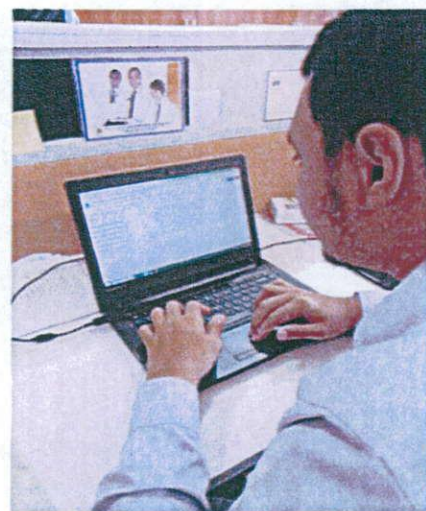
Gambar 7. Output revisi Bab I dengan *google docs*

b. Merevisi draf bab II Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata

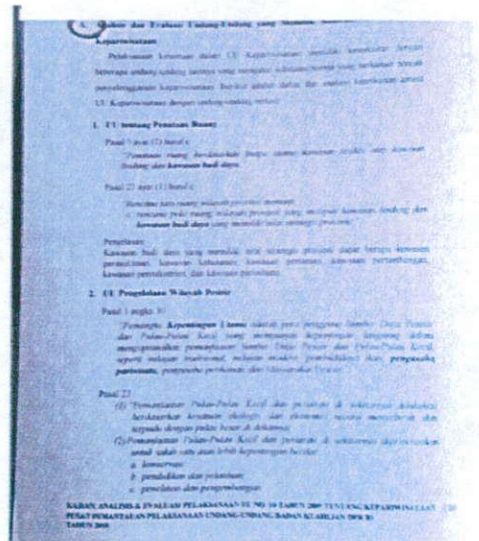
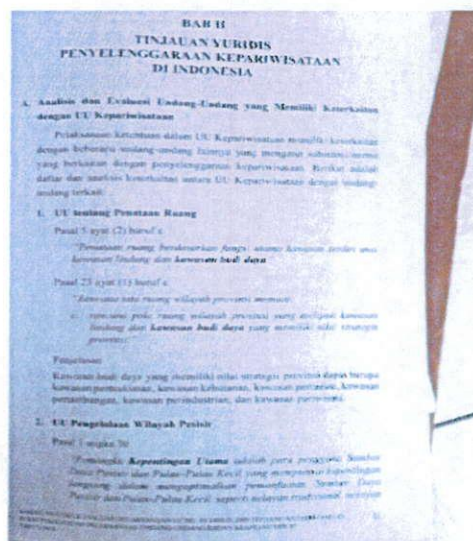
Pada kegiatan ketiga ini Penulis meminta file Bab II dari Tim Bab II UU Pariwisata, kemudian Penulis mengupload *softfile* draf Bab II ke dalam aplikasi *google docs*. Untuk tahap koordinasi tersebut menggambarkan teraplikasi nilai *whole of government* dan manajemen ASN. Selama pengerjaan Bab II dengan menggunakan aplikasi *google docs* Penulis memantau dan membantu padabila ada kendala dalam pengerjaan dan perkembangan revisi Bab II, sehingga terwujud nilai pelayanan publik. Kegiatan pengerjaan secara terintegrasi tersebut memudahkan dan mempercepat pengerjaan Bab II sehingga menggambarkan nilai komitmen mutu. Pembuktian dengan gambar di bawah ini menggambarkan nilai akuntabilitas.



Gambar 9. Analis Hukum melakukan revisi Bab II



Gambar 8. Penulis memantau proses revisi revisi Bab II pada google docs



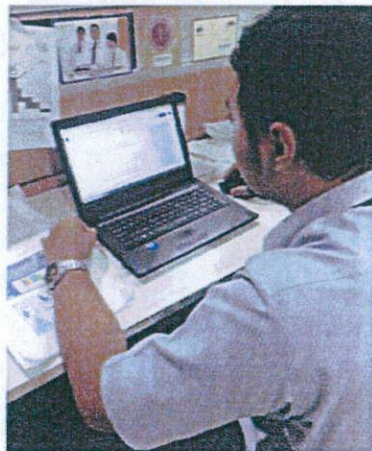
Gambar 10. Output revisi Bab II dengan google docs

c. **Merevisi draf bab III Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata**

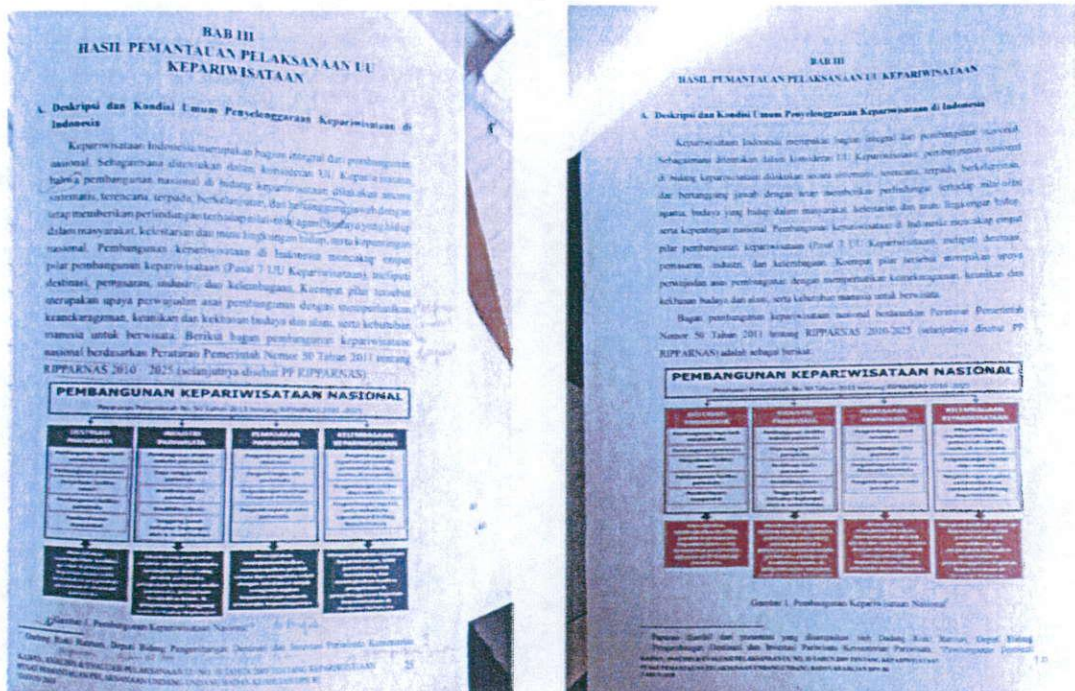
Kegiatan keempat yang Penulis lakukan adalah merevisi Bab III Buku Kajian, analisis dan evaluasi UU Pariwisata bersama Analis Hukum Puspanlak lainnya. Sebelumnya, Penulis meminta file Bab III dari Tim Bab III UU Pariwisata untuk di-upload ke dalam aplikasi *google docs* dan untuk tahap koordinasi tersebut menggambarkan teraplikasi nilai *whole of government* dan manajemen ASN. Setelah itu Penulis memantau pengerjaan dan perkembangan revisi Bab III pada aplikasi *google docs*, sehingga tergambar nilai pelayanan publik. Kegiatan pengerjaan secara terintegrasi tersebut memudahkan dan mempercepat pengerjaan Bab III sehingga menggambarkan nilai komitmen mutu. Pembuktian dengan gambar di bawah ini menggambarkan nilai akuntabilitas.



Gambar 11. Analis Hukum melakukan revisi Bab III dengan *google docs*



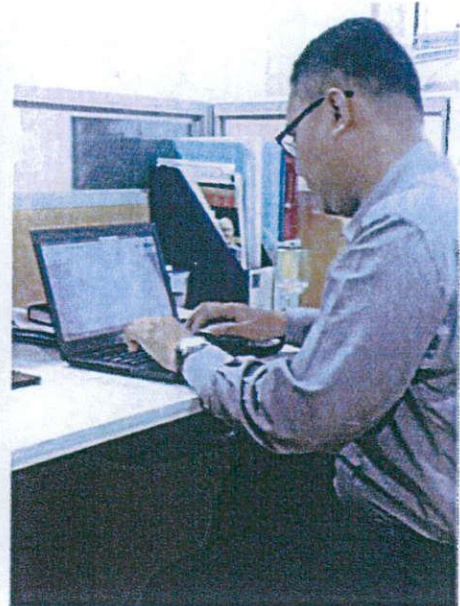
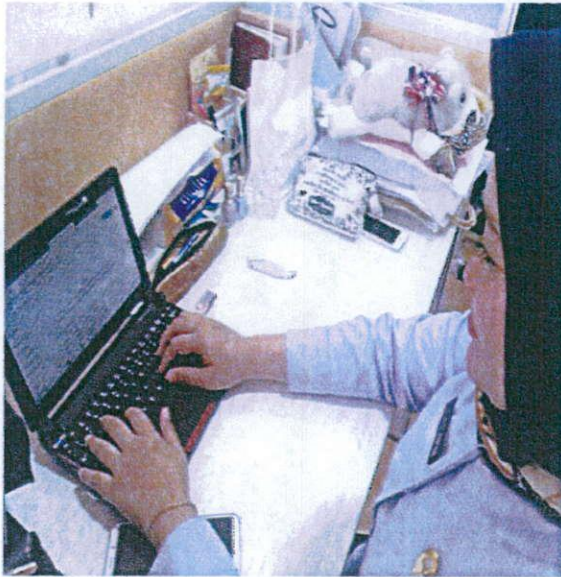
Gambar 12. Penulis memantau proses revisi revisi Bab III pada *google docs*



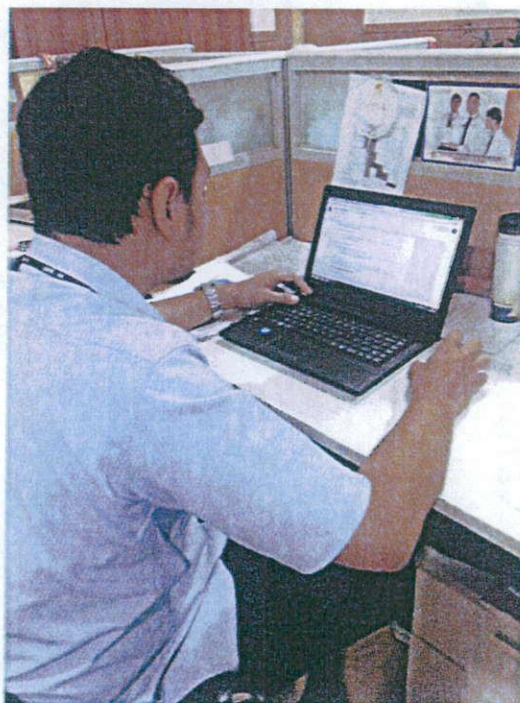
Gambar 13. Output revisi Bab III dengan google docs

d. Merevisi Bab IV Undang-Undang Pariwisata

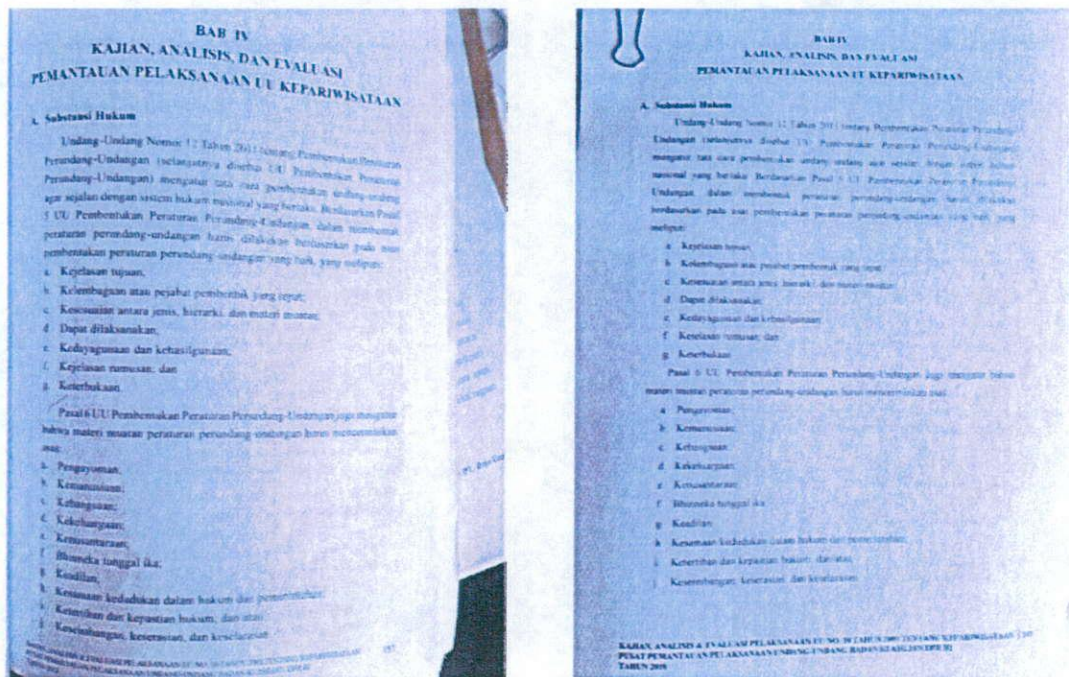
Pada kegiatan kelima ini Penulis meminta file Bab IV dari Tim Bab IV UU Pariwisata, kemudian Penulis mengupload *softfile* draf Bab IV ke dalam aplikasi *google docs*. Untuk tahap koordinasi tersebut menggambarkan teraplikasinya nilai *whole of government* dan manajemen ASN. Selama pengerjaan Bab IV dengan menggunakan aplikasi *google docs* Penulis memantau dan membantu apabila ada kendala dalam pengerjaan dan perkembangan revisi Bab IV, sehingga terwujud nilai pelayanan publik. Kegiatan pengerjaan secara terintegrasi tersebut memudahkan dan mempercepat pengerjaan Bab IV sehingga menggambarkan nilai komitmen mutu. Pembuktian dengan gambar di bawah ini menggambarkan nilai akuntabilitas.



Gambar 14. Analis Hukum melakukan revisi Bab IV dengan google docs



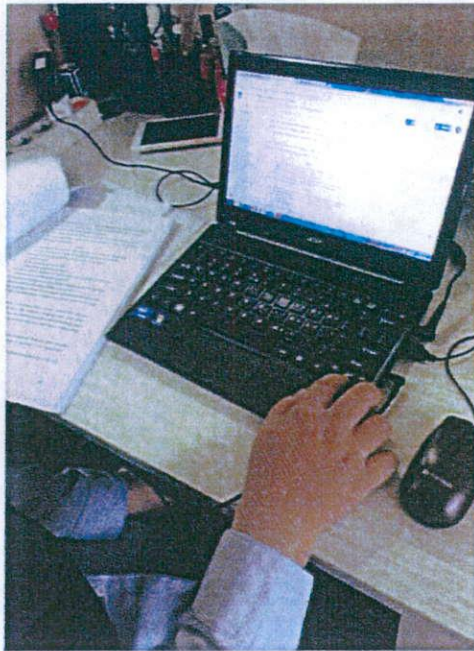
Gambar 15. Penulis memantau proses revisi revisi Bab IV pada google docs



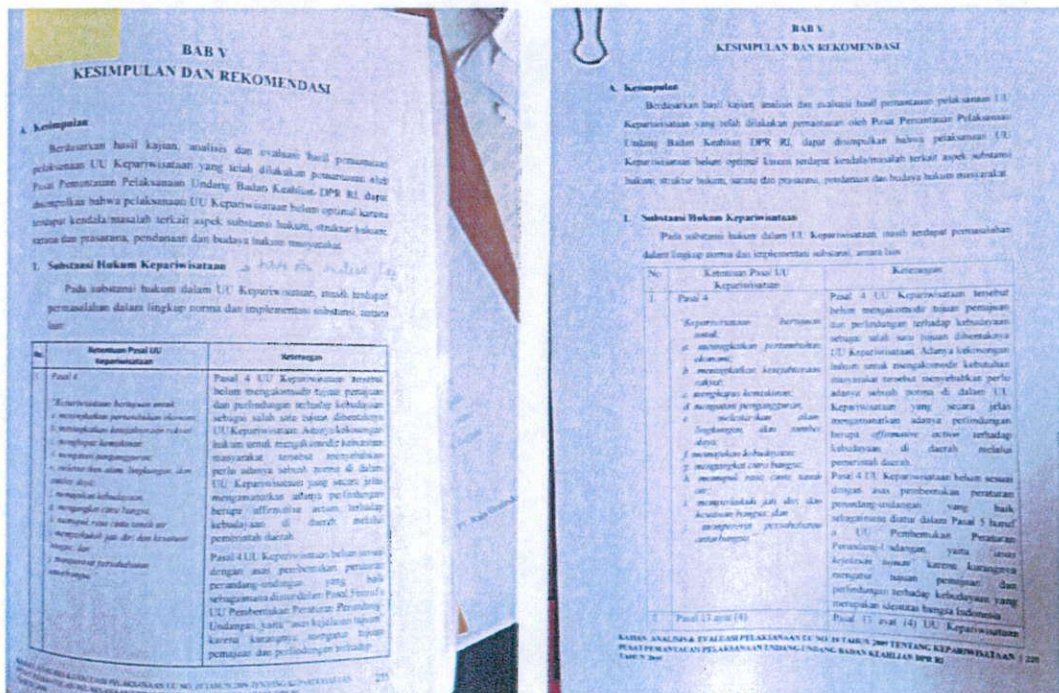
Gambar 16. Output revisi Bab IV dengan google docs

e. Merevisi Bab V Undang-Undang Pariwisata

Kegiatan keenam yang Penulis lakukan adalah merevisi Bab V Buku Kajian, analisis dan evaluasi UU Pariwisata bersama Analis Hukum Puspanlak lainnya. Sebelumnya, Penulis meminta file Bab V dari Tim Bab V UU Pariwisata untuk di-*upload* ke dalam aplikasi *google docs* dan untuk tahap koordinasi tersebut menggambarkan teraplikasi nilai *whole of government* dan manajemen ASN. Setelah itu Penulis memantau pengerjaan dan perkembangan revisi Bab V pada aplikasi *google docs*, sehingga mengaplikasikan pelayanan publik. Kegiatan pengerjaan secara terintegrasi tersebut memudahkan dan mempercepat pengerjaan Bab V sehingga menggambarkan nilai komitmen mutu. Pembuktian dengan gambar di bawah ini menggambarkan nilai akuntabilitas.



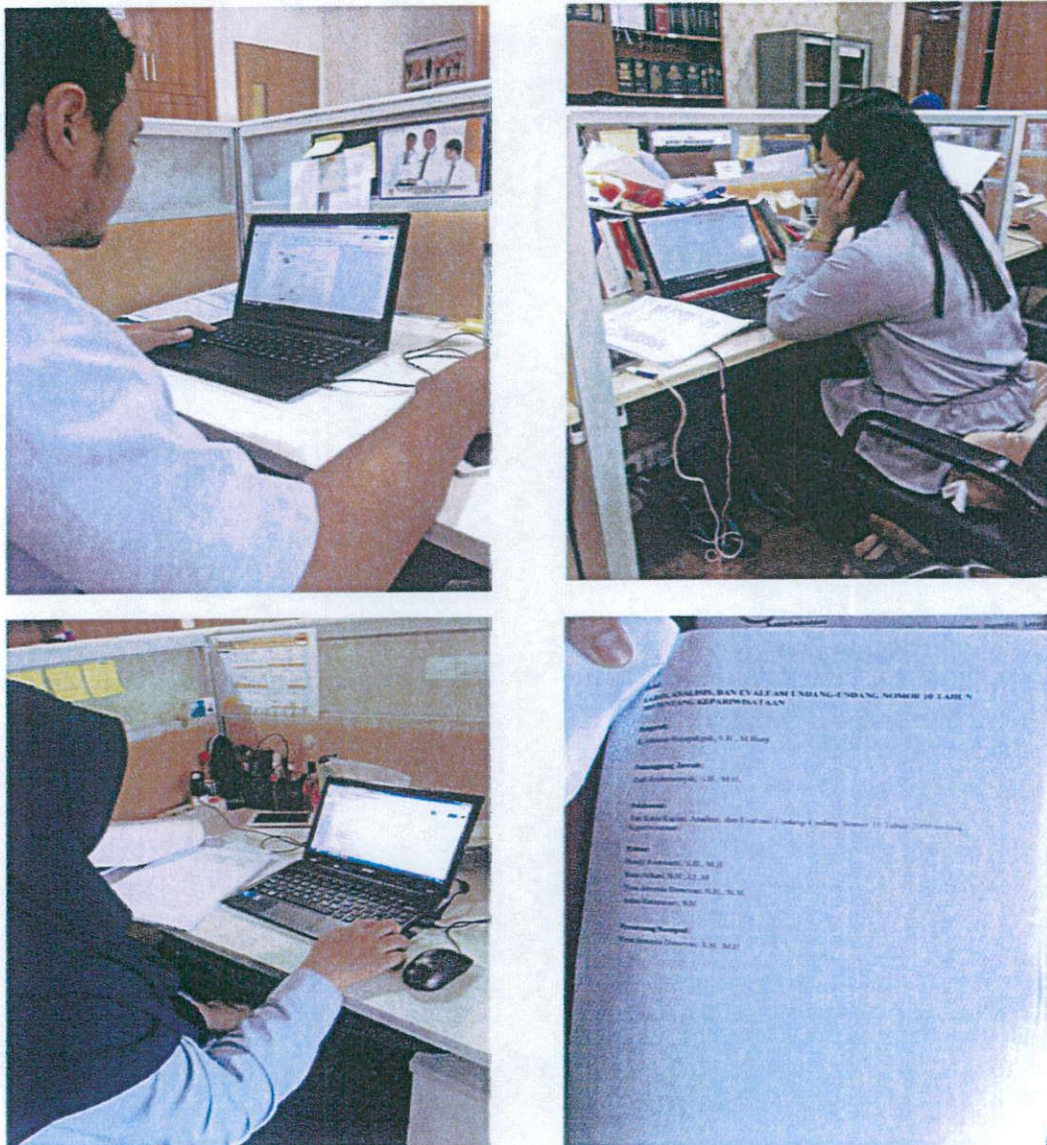
Gambar 17. Analis Hukum melakukan revisi Bab V dengan google docs



Gambar 18. Output revisi Bab V dengan google docs

3. Minggu kesembilan s.d. keduabelas (20 Juli 2018 s.d. 16 Agustus 2018)

Kegiatan ketujuh ini dilaksanakan kegiatan pengeditan draf buku keseluruhan oleh editor yang dilakukan pada minggu kesembilan sampai dengan duabelas. Pada kegiatan ini Penulis merupakan salah satu Tim Editor Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata. Kegiatan mengedit tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan editor lainnya, sehingga menggambarkan terapan nilai *whole of government*. Selain itu, Penulis mengkoordinasikan pengerjaan dengan aplikasi *google docs* yang menggambarkan nilai pelayanan publik. Kegiatan pengerjaan secara terintegrasi tersebut memudahkan dan mempercepat pengerjaan pengeditan sehingga menggambarkan nilai komitmen mutu. Pembuktian dengan gambar di bawah ini menggambarkan nilai akuntabilitas.



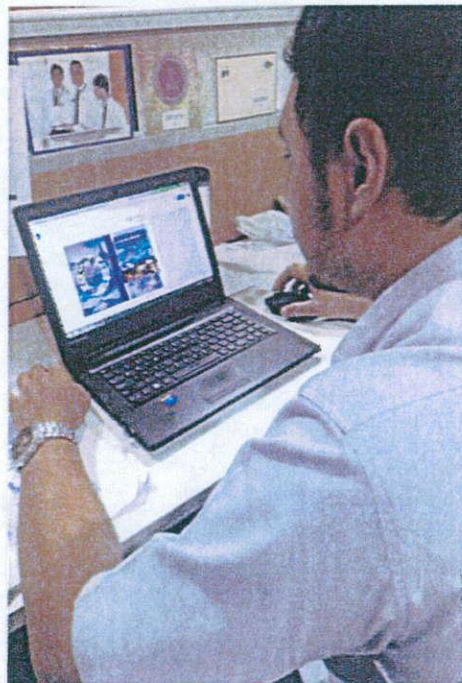
Gambar 19. Editor melakukan pengeditan draf buku dengan google docs

4. Minggu ketiga belas s.d kelimabelas (20 Agustus 2018 s.d. 25 Agustus 2018)

Pada minggu ketigabelas telah dilaksanakan kegiatan ketujuh yakni pembuatan draf *cover* (halaman sampul) untuk Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata. Penulis mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan membuat halaman sampul yang menggambarkan indahnya pariwisata dan kebudayaan di Indonesia, sehingga menggambarkan nilai Nasionalisme. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh Penulis supaya buku kajian, analisis dan evaluasi bisa cepat dicetak sehingga teraplikasi nilai komitmen mutu. Pembuktian dengan gambar di bawah ini menggambarkan nilai akuntabilitas.



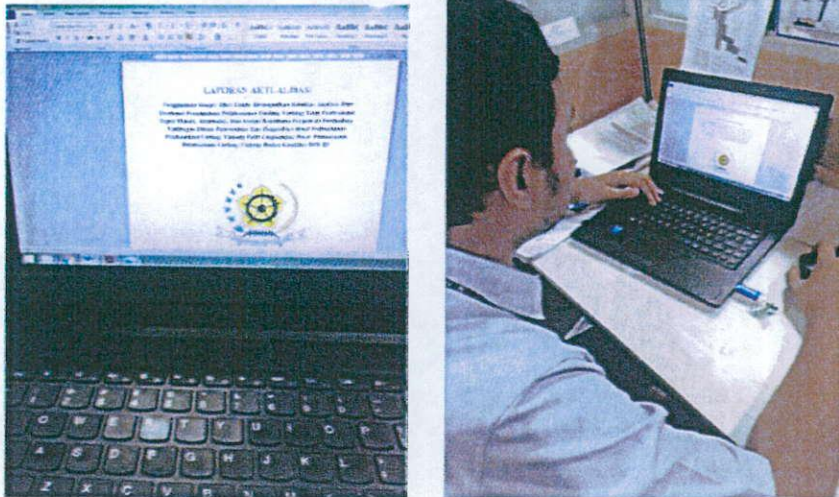
Gambar 20. Penulis membuat design halaman sampul Buku



Gambar 21. Penulis menggabungkan file design halaman sampul dengan file Buku

5. Minggu keempatbelas s.d. kelimabelas (27 Agustus s.d. 7 September 2018)

Selanjutnya pada minggu keempatbelas sampai dengan kelimabelas tersebut, Penulis melaksanakan kegiatan penyusunan draf laporan hasil pelaksanaan rancangan aktualisasi. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi ini merupakan wujud pengaplikasian nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Pengerjaan seluruh tahapan kegiatan dengan cepat adalah wujud dari komitmen mutu.



Gambar 22. Penulis menyusun Laporan Pelaksanaan Aktualisasi

6. Minggu keenambelas (12 September 2018)

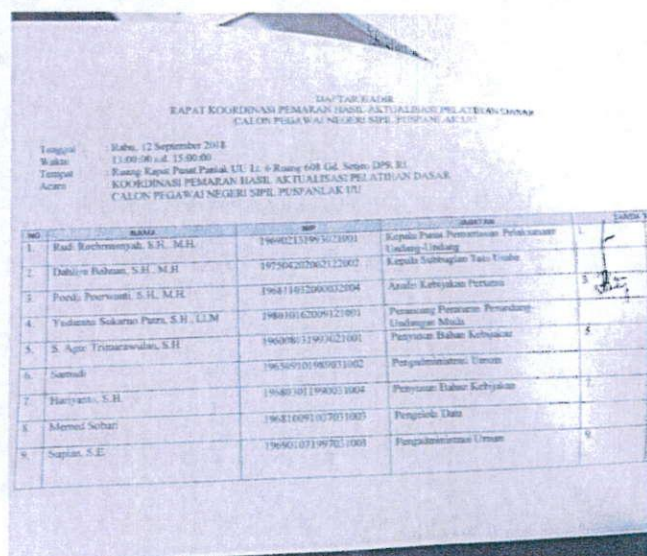
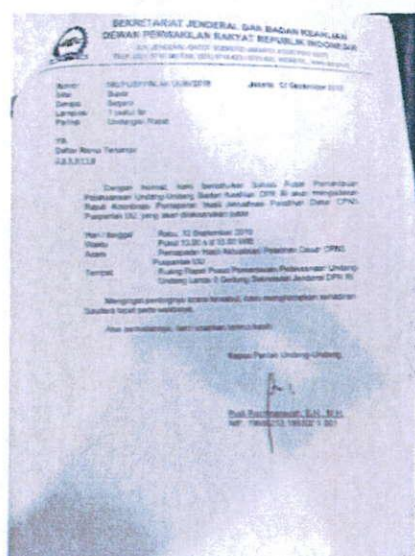
Pada 12 September 2018 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Latsar CPNS bersama Para Analis Hukum, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang telah dilaksanakan untuk berkoordinasi dengan mentor dan analis hukum lainnya untuk membahas hasil aktualisasi Penulis, yang mana hal tersebut menggambarkan nilai komitmen mutu, etika publik, manajemen ASN dan *whole of government*. Adapun *output* dari kegiatan rapat tersebut berupa undangan rapat, laporan singkat dan daftar hadir peserta rapat, yang menunjukkan aplikasi nilai akuntabilitas dan anti korupsi.



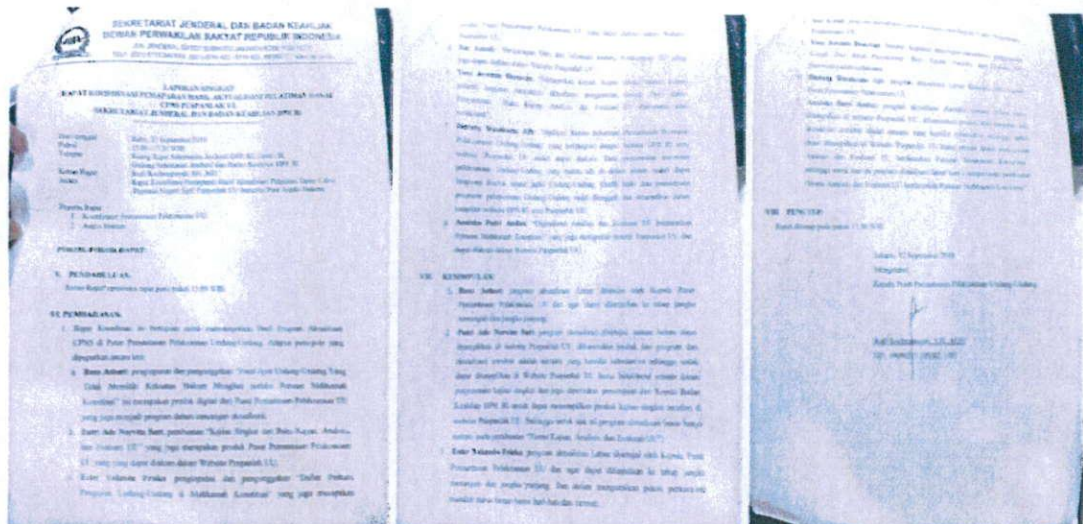
Gambar 23. Penulis memegang dumi Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata



Gambar 24. Penulis melaksanakan rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Latsar CPNS bersama Para Analis Hukum dengan Mentor



Gambar 25. Undangan dan daftar hadir rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi CPNS Analis Hukum Puspanlak



Gambar 28. Lapsing rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi CPNS
Analisis Hukum Puspanlak

G. Monitori Kegiatan

Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah Penulis laksanakan, secara sederhana dapat digambarkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi sebagai berikut:

No.	Rencana Kegiatan	Rencana Tahapan Kegiatan	Realisasi Tahapan Kegiatan	Keterangan	Bukti	Nilai yang diaplikasikan
1.	Konsultasi dengan Kepala Puspanlak UU BK DPR RI, Korbid Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan seluruh Analis Hukum terkait sosialisasi penggunaan <i>google docs</i>	a. Penyusunan prosedur manual untuk penggunaan <i>google docs</i>	Menyusun prosedur manual untuk penggunaan <i>google docs</i>	Selesai	Gambar Lampiran	Akuntabilitas, etika publik, Komitmen Mutu, Anti korupsi, <i>whole of government</i> , manajemen ASN
		b. Konsultasi dengan Kepala Puspanlak, kordinator bidang pemantauan pelaksanaan undang dan analisis hukum untuk	Menemui Kepala Puspanlak, kordinator bidang pemantauan pelaksanaan undang dan analisis hukum untuk	Selesai	Gambar Lampiran	Akuntabilitas, Etika Publik, <i>whole of government</i> , manajemen ASN.

	untuk hasil kajian, analisis dan evaluasi undang-undang	mensosialisasikan penggunaan <i>google docs</i> dalam pengerjaan laproran pemantauan pelaksanaan undang-undang.	menggunakan <i>google docs</i> dalam pengerjaan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Pariwisata			
2.	Merevisi Bab I Buku Kajian, analisis dan evaluasi UU Pariwisata	Merevisi draf bab I Buku Kajian, analisis dan evaluasi UU Pariwisata	Merevisi draf bab I Buku Kajian, analisis dan evaluasi UU Pariwisata dengan menggunakan <i>google docs</i>	Selesai	Gambar	Akuntabilitas, Etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik <i>whole of government</i> , manajemen ASN.
3.	Merevisi Bab II Undang-Undang Pariwisata.	Merevisi draf bab II Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata	Merevisi draf bab II Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata menggunakan <i>google docs</i> .	Selesai	Gambar	Akuntabilitas, Etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik <i>whole of government</i> , manajemen ASN.
4.	Merevisi Bab III Undang-Undang Pariwisata	Merevisi draf bab III Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata.	Merevisi draf bab III Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata	Selesai	Gambar	Akuntabilitas, Etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik <i>whole of government</i> , manajemen

			menggunakan <i>google docs</i> .			ASN.
5.	Merevisi Bab IV Undang-Undang Pariwisata	Merevisi draf bab IV Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata.	Merevisi draf bab IV Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata dengan <i>google docs</i> .	Selesai	Gambar	Akuntabilitas, Etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik <i>whole of government</i> , manajemen ASN.
6.	Merevisi Bab V Undang-Undang Pariwisata	Merevisi draf bab V Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata.	Merevisi draf bab V Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata dengan <i>google docs</i> .	Selesai	Gambar	Akuntabilitas, Etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik <i>whole of government</i> , manajemen ASN.
7.	Mengedit Bab I, II, III dan IV Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata	a. Menyatukan Bab I sampai dengan Bab IV draf Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata.	Menyatukan Bab I sampai dengan Bab IV draf Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata menggunakan <i>google docs</i> .	Selesai	Gambar	Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Anti korupsi, <i>whole of government</i> , manajemen ASN

		b. Mengedit Bab I sampai dengan Bab IV draf Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata.	Mengedit Bab I sampai dengan Bab IV draf Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata menggunakan <i>google docs</i> .	Selesai	Gambar	Akuntabilitas, etika publik, Komitmen Mutu, Anti korupsi, <i>whole of government</i> , manajemen ASN
8.	Membuat <i>design</i> halaman sampul (<i>cover</i>) buku kajian, analisis, dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata	Membuat draf cover buku hasil pemantauan pelaksanaan UU Kepariwisata	Membuat draf cover buku hasil pemantauan pelaksanaan UU Kepariwisata dengan menggunakan <i>photoshop</i>	Selesai	Gambar	Akuntabilitas, Nasionalisme, <i>whole of government</i> , Pelayanan publik
9.	Menyusun Laporan Aktualisasi	a. Mengumpulkan <i>output</i> dari semua tahapan kegiatan yang telah dilakukan sebagai bukti		Selesai	Gambar	Akuntabilitas, Komitmen mutu, anti korupsi
		b. Menyusun Laporan Aktualisasi secara komprehensif.		Selesai	Gambar	Akuntabilitas, Komitmen mutu, anti korupsi
10.	Rapat Koordinasi	Memberikan laporan hasil	Seluruh kegiatan	Selesai	Gambar	Akuntabilitas, Etika Publik,

Pemaparan Hasil Aktualisasi Latsar CPNS bersama Para Analis Hukum	pelaksanaan aktualisasi penggunaan <i>google docs</i> untuk pengerjaan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU Pariwisata	aktualisasi terlaksana		Lampiran	<i>whole of government, manajemen ASN</i>
---	---	------------------------	--	----------	---

H. Analisis Dampak

Penggunaan fasilitas *google docs* ini setelah dilaksanakan dalam waktu kurang lebih tiga bulan ini telah mengintegrasikan pengerjaan penyusunan dan pengeditan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang pariwisata. Hal tersebut telah membuat pengerjaan pembuatan buku kajian, evaluasi dan analisis menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Hal tersebut apabila dijalankan secara berkesinambungan akan berdampak pada optimalisasi tugas keahlian di bidang pengawasan pelaksanaan undang-undang pada Puspanlak UU BK DPR RI. Namun, sebaliknya apabila pengerjaan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang tetap dengan menggunakan cara manual seperti sebelumnya, maka tugas dukungan keahlian Puspanlak UU di bidang pengawasan pelaksanaan undang-undang akan menjadi kurang efektif dan efisien.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi dan masa habituasi yang telah dilaksanakan Penulis sebagai CPNS pada Puspanlak UU kurang lebih tiga bulan telah memberikan sebuah hubungan timbal balik (*feed back*) antara Penulis dengan Instansi tempat Penulis bekerja. Dalam hal ini penggunaan *google docs* telah cukup efektif memberikan percepatan kinerja untuk penyusunan dan pengeditan draf Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka terwujudnya visi Puspanlak UU, yakni mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Penulis, pelaksanaan kegiatan tersebut telah menciptakan sebuah pemahaman dan implementasi atas nilai ANEKA serta nilai manajemen ASN, *whole of government* dan pelayanan publik yang telah diajarkan pada agenda Latsar CPNS Tahun 2018 khususnya yang diselenggarakan di PKP21 LAN Jatinangor. Nilai ANEKA dan 3 nilai dasar ASN tersebut selain berfungsi dalam memberikan pedoman untuk mengerjakan kegiatan rancangan aktualisasi Latsar CPNS, juga pada masa habituasi memberikan pedoman bagi Penulis mengerjakan tugas profesi ASN sebagai Analis Hukum di Puspanlak UU dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati.

B. Saran

Penggunaan aplikasi *google docs* terus dilaksanakan dan dipelajari apabila terdapat fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang pemakaiannya sehingga optimalisasi kinerja pemantauan pelaksanaan undang-undang pada Puspanlak UU dapat terus terjadi.

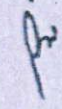
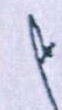
LAMPIRAN

A. Dokumentasi Mentoring



LEMBAR BIMBINGAN MENTOR

Nama : Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.
Instansi : Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
Tempat Aktualisasi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Judul Rancangan Aktualisasi : Penggunaan *Google Docs* untuk mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengeditan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf Mentor
1.	5 Juni 2018	Konsultasi dengan Kepala Puspanlak UU BK DPR RI, terkait penggunaan <i>google docs</i> untuk hasil kajian, analisis dan evaluasi undang-undang.	
2.	6 Juni 2018	Menghimpun data pemantauan pelaksanaan undang-undang pariwisata dari setiap Tim Bab untuk dimasukkan ke dalam draf <i>google docs</i> .	
3.	8 Juni 2018	Konsultasi dengan Kepala Puspanlak UU BK DPR RI kembali terkait penggunaan secara teknis aplikasi <i>google docs</i> dalam mengoreksi draf setiap bab hasil pemantauan pelaksanaan UU Pariwisata.	
4.	20 Juli 2018	Memberitahukan kepada mentor mengenai perkembangan pengerjaan Bab I sampai dengan Bab V dengan menggunakan <i>google docs</i> dan melanjutkan kepada pengeditan draf Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata	

B. Prosedur Manual Penggunaan Google Docs

RANCANGAN AKTUALISASI YOSA

Nama proyek:

Penggunaan *Google Docs* untuk mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengeditan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Deskripsi singkat:

Penggunaan fasilitas *google docs* membuat semua Analis Hukum menjadi terintegrasi dalam menyatukan dan mengedit draf narasi hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang, selain itu koordinator bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang dapat memantau pengerjaan setiap tim bab draf narasi tersebut secara *real time*. Hal tersebut juga dapat memudahkan Kepala Puspanlak UU dalam memantau kinerja dan kesamaan bahasa setiap bab hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang.

Dokumen *google docs* sebelum dibagikan kepada masing-masing tim bab, terlebih dahulu draf dokumen *google docs* akan dibuat oleh Perancang Aktualisasi dari draf yang telah disusun oleh masing-masing tim bab.

Setelah mengerjakan draf dokumen hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang tersebut, Perancang Aktualisasi selanjutnya mengirimkan dokumen *google docs* kepada masing-masing Analis Hukum per-tim-nya, Koordinator bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang dan Kepala Puspanlak UU.

Tahapan pengerjaan penggunaan *google docs*:

1. Perancang Aktualisasi akan menghimpun data yang telah dikumpulkan Analis Hukum per Tim Bab yang telah dibagi tugasnya oleh Koordinator Bidang
2. Selanjutnya Perancang Aktualisasi akan membuat draf pengerjaan data yang telah dihimpun sebelumnya pada *google docs*.



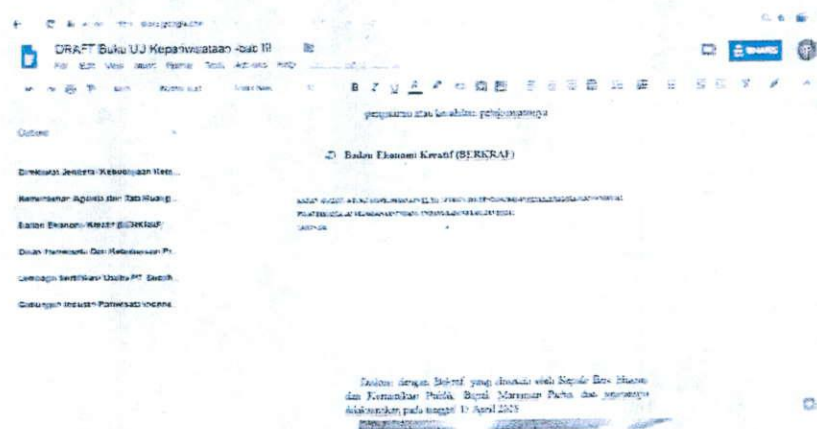
3. Perancang Aktualisasi kemudian akan membagikan link draf *google docs* tersebut ke masing-masing tim.



4. Selanjutnya Perancang Aktualisasi akan memberikan pengarahan mengenai prosedur teknis pengerjaan dengan *google docs*.

- Perancang Aktualisasi akan membatasi hanya Analis Hukum yang masuk tim yang dapat mengerjakan pengeditan substansi atau gambar.
- Pengerjaan akan dipantau oleh Perancang Aktualisasi setiap hari dan Perancang Aktualisasi membarikan laporan kepada Koordinator Bidang Kepala Pusat.
- Pengerjaan juga akan dipantau oleh Kepala Puspanlak juga.

5. Perancang Aktualisasi memberikan link kepada Perancang pada pengarahan tersebut dan mensimulasikannya.



RANCANGAN AKTUALISASI YOSA

6. Setelah itu, Perancang Aktualisasi akan membagikan link kepada Kepala Puspanlak dan Koordinator Bidang.
7. Koreksi dilakukan dengan memberikan komentar.



8. Setelah diberikan koreksi dalam bentuk komentar oleh Kepala Puspanlak atau Koordinator Bidang, Analis Hukum memperbaikinya segera.
9. Setelah draf bab yang dikerjakan dianggap telah tuntas dikoreksi oleh Kepala Puspanlak, file tersebut kemudian disave/download atau diprin untuk dimasukan sebagai draf ke percetakan.



Tahapan Kegiatan Aktualisasi:

- 1) Konsultasi dengan Kepala Puspanlak UU BK DPR RI, Korbid Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan seluruh Analis Hukum terkait sosialisasi penggunaan *google docs* untuk hasil kajian, analisis dan evaluasi undang-undang
 - a. Penyusunan prosedur manual untuk penggunaan *google docs*
 - b. Rapat dengan Kepala Puspanlak, kordinator bidang pemantauan pelaksanaan undang dan analisis hukum untuk mensosialisasikan penggunaan *google docs* dalam pengerjaan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang.
- 2) Merevisi Bab I Buku Kajian, analisis dan evaluasi UU Pariwisata
 - a. Merevisi draf bab I Buku Kajian, analisis dan evaluasi UU Pariwisata
 - b. Memastikan draf Bab I tersebut yang telah diedit kepada Kepala Puspanlak apakah masih ada perbaikan atau tidak
- 3) Menyusun dan merevisi Bab II Undang-Undang Pariwisata
 - a. Menyusun draf bab II Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata
 - b. Merevisi draf bab II Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata
 - c. Memastikan draf Bab II tersebut yang telah diedit kepada Kepala Puspanlak apakah masih ada perbaikan atau tidak
- 4) Merevisi Bab III Undang-Undang Pariwisata
 - a. Merevisi draf bab III Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata
 - b. Memastikan draf Bab III tersebut yang telah diedit kepada Kepala Puspanlak apakah masih ada perbaikan atau tidak.
- 5) Membuat dan Merevisi Bab IV Undang-Undang Pariwisata
 - a. Menyusun draf bab II Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata
 - b. Merevisi draf bab II Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata
 - c. Memastikan draf Bab II tersebut yang telah diedit kepada Kepala Puspanlak apakah masih ada perbaikan atau tidak
- 6) Mengedit Bab I, II, III dan IV Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata:
 - a. Menyatukan Bab I sampai dengan Bab IV draf Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata
 - b. Mengedit Bab I sampai dengan Bab IV draf Buku Kajian, analisis dan evaluasi Undang-Undang Pariwisata
- 7) Menyusun Laporan Aktualisasi
 - a. Mengumpulkan *output* dari semua tahapan kegiatan yang telah dilakukan sebagai bukti
 - b. Menyusun Laporan Aktualisasi secara komprehensif.

C. Surat-Surat



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 126/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 4 Juni 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat mengenai Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang.

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal Selasa, 5 Juni 2018
Waktu 10:00:00 s.d. 12:00:00
Tempat Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Sejen DPR RI
Acara PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Roch Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.
2	Dadang Priyana, S.IP., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	2.
3	Dahliya Halimat, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	3.
4	Sondang E. Sazaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya	4.
5	Fariza Enira, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	5.
6	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	6.
7	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analisis Kebijakan Perairan	7.
8	Endang Hendrajipta, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda	8.
9	Rahayu Yuni Susanti, S.T.	198506102009122003	Pranata Komputer Muda	9.
10	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan	10.

11.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	11.
12.	Haryanto, S.H.	196803031990031004	Penyusun Bahan Kebijakan	12.
13.	Memed Solhaer	196810091007031003	Pengetola Data	13.
14.	Supian, S.E.	196601071997031004	Pengadministrasi Umum	14.
15.	Mushtyanan	197011101997032006	Pengetola Data	15.
16.	Martin Yohannes	197703131994031004	Pengetola Data	16.
17.	Atis Jaclani	197603262001121601	Pengadministrasi Umum	17.
18.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analisis Hukum	18.
19.	Ester Yolarika Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analisis Hukum	19.
20.	Reza Azhari, S.H., I.L.M.	198807182018012001	Analisis Hukum	20.
21.	Ica Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analisis Hukum	21.
22.	Yosa Jeremia Donnyan, S.H., M.H.	199103202018011002	Analisis Hukum	22.
23.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analisis Hukum	23.
24.	Nachia Septyana	199409022005022001	Analisis Hukum	24.
25.	Jordan Mahsunad, S.H.	2206080904	PPNPN	25.
26.	Trisubanto Chinton, S.H.	2206080905	PPNPN	26.

27.	Pinanti Mega Dewanti, S.H	220000006	PPNPN	27.	
28.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yodakusuma, S.H., M.Kn	220000010	PPNPN		28.
29.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	220000016	PPNPN	29.	
30.	Aska Cardima, S.H	220000019	PPNPN		30.
31.	Donny Satya Widjanarko, S.H	220000020	PPNPN	31.	
32.	Deny Giovanni, S.H	220000021	PPNPN		32.
33.	Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn.	220000022	PPNPN	33.	
34.	Anisha Rahmasari, S.H	220000023	PPNPN		34.
35.	Yodia Surya Nugraha, S.H	220000024	PPNPN	35.	
36.	Juan Fery Situmorang, S.H	220000025	PPNPN		36.
37.	Antonius Samturnip, S.H	220000026	PPNPN	37.	
38.	Deby Nurhidayat, S.H., M.Kn	220000027	PPNPN		38.
39.	Ratna Dewi Tisnasari, S.H.	220000028	PPNPN	39.	
40.	Krikammarus Novianti Qori, S.H	220000029	PPNPN		40.
41.	Suly Leginasari	180000036	PPNPN	41.	
42.	Muhammad Khadafi	190000064	PPNPN		42.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO, JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 348 FAX. (021) 5715 423 / 5715 625 WEBSITE: www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEABLIAN DPR RI

Hari/tanggal: Selasa, 5 Juni 2018
Pukul: 10.00-12.00 WIB
Tempat: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat: Rudi Rochmansyah, SH, MH
Acara: Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil Puspantak UU bersama Bidang Data dan Teknologi
Informasi

Peserta Rapat:
1. Pranata Komputer Madya
2. Pranata Komputer Madya
3. Analis Hukum
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

1. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.00 WIB

II. PEMBAHASAN

- Masing-masing CPNS Analis Hukum menjelaskan kepada pihak BDTJ tentang program dalam rancangan aktualisasi.
- Program rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis Hukum sebagai berikut:
 - Patri Ade Norvita Sari: Pembuatan tempat pengingat dan pengingat-pengingat Kajian Analisis dan Evaluasi UU di Website Puspantak.
 - Ester Yolanda Friska: Pembuatan tempat pengingat-pengingat dan pengingat-pengingat daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi & Website Puspantak.
 - Rexa Azhari: Pembuatan tempat pengingat-pengingat dan pengingat-pengingat konstitusi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Website Puspantak.

- d. Nur Azizah: Pembuatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Website Puspanlak untuk menjangkau aspirasi masyarakat dalam rangka pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- e. Yosa Jeremis D: konsultasi dengan Kepala Puspanlak BK DPR RI serta memberitahukan mengenai rancangan aktualisasi berupa penggunaan aplikasi *google docs* yang berfungsi untuk mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai dengan Bab V buku hasil pemantauan Undang-Undang Pariwisata kepada Analis Hukum dan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Puspanlak BK DPR RI

III. KESIMPULAN:

1. Tempat pengitutan dan pengunggahan untuk rancangan aktualisasi Puari Ade Norvita Sari, Ester Yofanda Friska, Raza Azhari dan Nur Azizah dalam proses pembuatan;
2. Rancangan aktualisasi Yosa Jeremis D berupa penggunaan aplikasi *google docs* untuk mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai dengan Bab V buku hasil pemantauan Undang-Undang Pariwisata telah siap untuk dilaksanakan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 5 Juni 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang


Endang Ruchmanawati, S.H., M.H.

NIP. 19490213 199302 1001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 345 FAX. (021) 5715 425 5715 925 WEBSITE www.dpr.go.id

Nomor 168/PUSPANLAK UU/9/2018 Jakarta, 12 September 2018
Sifat Biasa
Derajat Segera
Lampiran 1 (satu) lbr
Perihal Undangan Rapat

Yth
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat, kami beritahu bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Puspantak UU yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal Rabu, 12 September 2018
Waktu Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB
Acara Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Puspantak UU
Tempat Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharap kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Pantak Undang-Undang.

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 198302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal Rabu, 12 September 2018
Waktu 13:00:00 s.d. 15:00:00
Tempat Ruang Rapat Pusat Pantak UU Lt. 5 Ruang 608 Gd. Sejen DPR RI
Acara KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131983021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.
2	Dahliya Bahman, S.H., M.H.	197504282002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	2.
3	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811052000032004	Asas Kebijakan Permana	3.
4	Yudarna Sukarno Putra, S.H., LL.M	198010162009121001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	4.
5	S. Agus Trimawulan, S.H.	196008051993021001	Penyusun Bahan Kebijakan	5.
6	Samudi	196509101983031002	Pengadministrasi Umum	6.
7	Harjanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan	7.
8	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	8.
9	Sapian S.E.	196901071997021001	Pengadministrasi Umum	9.

10	Musbiyatus	197011101997032006	Pengelola Data		10
11	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	11	
12	Atis Jaciani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum		12
13	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analisis Hukum	13 <i>As</i>	
14	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analisis Hukum		14 <i>SS</i>
15	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analisis Hukum	15	
16	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810052018012001	Analisis Hukum		16 <i>9</i>
17	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analisis Hukum	17 <i>As</i>	
18	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.	199202222018011001	Analisis Hukum		18
19	Putri Ade Norvina Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analisis Hukum	19 <i>SS</i>	
20	Annisha Putri Andini	199111072018012002	Analisis Hukum		20 <i>an</i>
21	Nadia Septyana	198409022005022001	Analisis Hukum	21	
22	JORDAN MUHAMMAD, S.H.	220000004	PPNPN		22 <i>As</i>
23	TRISUHARTO CLINTON, S.H.	220000005	PPNPN	23 <i>As</i>	
24	PINANTI MEGA DEWANTI, S.H.	220000006	PPNPN		24 <i>As</i>
25	RR LUCIA P DEWI DAMAYANTI YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.	220000010	PPNPN	25	

26	MEGA TRIANNA RATU, S.H., MBA	220000016	PPNPN		26 <i>SS</i>
27	ASKA CARDIMA, S.H.	220000019	PPNPN	27 <i>As</i>	
28	DONNY SATYA WIDJANARKO, S.H.	220000020	PPNPN		28 <i>SS</i>
29	DENY GIOVANNO, S.H.	220000021	PPNPN	29	
30	ENDANG SULISTYORINI, S.H., M.KN.	220000022	PPNPN		30 <i>SS</i>
31	ANISHA RAHMASARI, S.H.	220000023	PPNPN	31	
32	YODIA SURYA NUGRAHA, S.H.	220000024	PPNPN		32 <i>SS</i>
33	JUAN FERY SITUMORANG, S.H.	220000025	PPNPN	33	
34	ANTONIUS SAMTURNIP, S.H.	220000026	PPNPN		34 <i>SS</i>
35	DEDY KURHIDAYAT, S.H., M.KN.	220000027	PPNPN	35	
36	RATNA DEWI TISNASARI, S.H.	220000028	PPNPN		36 <i>SS</i>
37	KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, S.H.	220000029	PPNPN	37 <i>As</i>	
38	SULY LEGINASARI	180000086	PPNPN		38
39	MUAMMAR KHADAFI	190000064	PPNPN	39	



LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI PEMAPARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEABLIHAN DPR RI

Hari tanggal: Rabu, 12 September 2018
Pukul: 15.00 - 17.30 WIB
Tempat: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat: Rudi Rochmanayah, SH, MH
Acara: Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil Puspantak UU bersama Para Analis Hukum

Peserta Rapat:
1. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Analis Hukum.

POKOK-POKOK RAPAT:

V. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15.00 WIB

VI. PEMBAHASAN:

1. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Hasil Program Aktualisasi CPNS di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun poin-poin yang diungkapkan antara lain:

- Reza Azhari:** penginputan dan pengunggahan "Pasal Ayat Undang-Undang Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" ini merupakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang juga menjadi program dalam rancangan aktualisasi;
- Putri Ade Nurvita Sari:** pembuatan "Kajian Singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU" yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat diakses dalam Website Puspantak UU;
- Ester Yolanda Friska:** penginputan dan pengunggahan "Draf Perkarat Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" yang juga merupakan

produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat diakses dalam Website Puspantak UU;

- Nur Azizah:** "Penyusunan Data dan Informasi tentang Pelaksanaan UU" yang juga dapat diakses dalam Website Puspantak UU;

- Yosa Jeremia Donotua:** "Penggunaan Google Docs dalam Penyusunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU";

- Eintang Wicaksono Aji:** "Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang" yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website Puspantak UU. Menampilkan data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dibacak sesuai judul Undang-Undang. Selain itu juga memiliki BMD untuk membuat grafik hasil data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website DPR RI serta Puspantak UU;

- Ananda Putri Andini:** "Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi" yang juga merupakan produk Puspantak UU dan dapat diakses dalam Website Puspantak UU.

VII. KESIMPULAN:

- Reza Azhari:** program aktualisasi Lulus disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat diunggah ke website jangka menengah dan jangka panjang;
- Putri Ade Nurvita Sari:** program aktualisasi disetujui, namun belum dapat diunggah ke website Puspantak UU, dikarenakan produk dari program dan aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantif sehingga untuk dapat diunggah ke Website Puspantak UU harus betul-betul benar dalam penyusunan kajian singkat dan juga diperlukan persetujuan dari Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk dapat mengunggah produk kajian singkat tersebut ke website Puspantak UU. Sehingga untuk saat ini program aktualisasi lanjut harus sampai pada pembuatan "Home Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU";
- Ester Yolanda Friska:** program aktualisasi Lulus disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat diunggah ke website jangka menengah dan jangka panjang. Dan dalam mengunggah pokok perkara/ruas masalah harus benar-benar faktual dan benar;
- Nur Azizah:** program aktualisasi Lulus disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU

5. **Yosa Jeremia Donovan** untuk ditambahkan kolom persetujuan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dalam *google docs*;
6. **Bintang Wicaksono Ajie**: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
7. **Annisha Putri Andini**: program aktualisasi disetujui, namun belum dapat ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan "Home Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi"

VIII. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 17.59 WIB

Jakarta, 12 September 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199502.1001

D. Dokumentasi Coaching



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

No. : PL/1044/SETJEN DAN BK-DPR RI/PL.02/09/2018

Yth. : Kapus Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Dari : Lakhur Kapus Diklat
Hal : Permohonan ijin untuk melakukan coaching di PKP2A I LAN Jatinangor
Tanggal : 17 September 2018

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara akan memasuki tahap evaluasi pelaksanaan aktualisasi pada tanggal 25 September 2018.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak kiranya kepada peserta pelatihan tersebut yang berada di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang atas nama:

1. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.
2. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.

dapat diberikan ijin untuk melakukan coaching di PKP2A I LAN Jatinangor pada tanggal 18 September 2018 dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

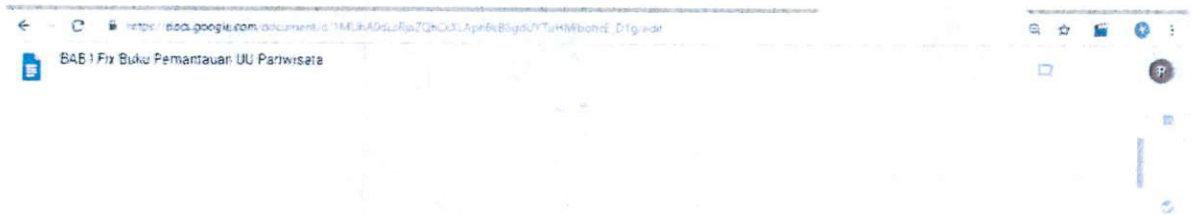
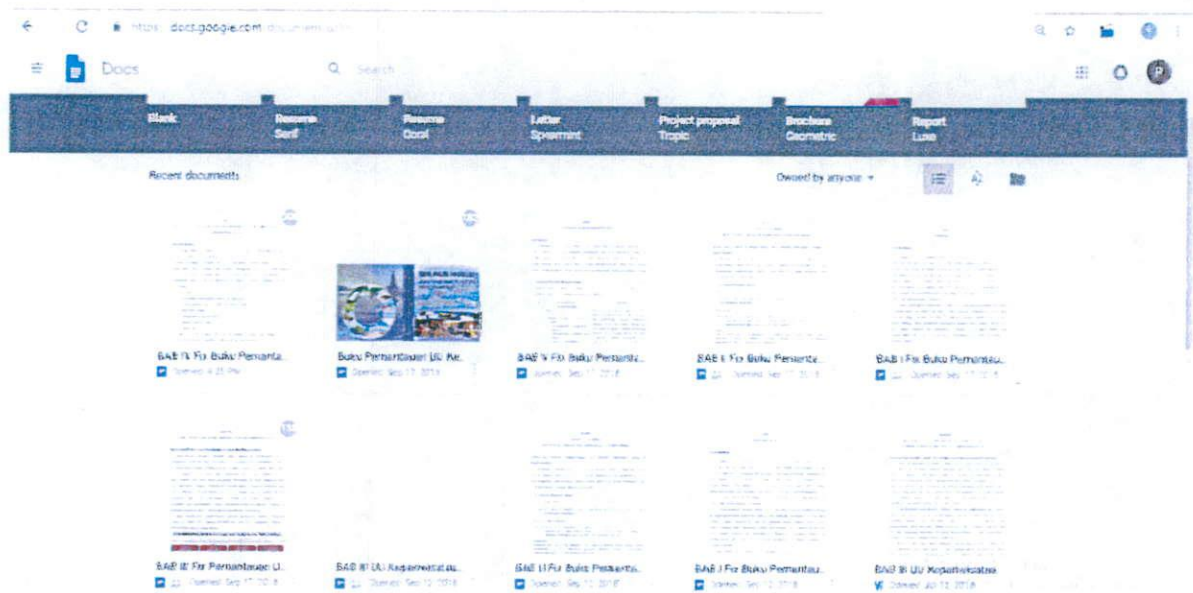
Lakhur Kapus Pendidikan dan Pelatihan

Rusmanto, S.H., M.H.
NIP. 19711212199031001

E. Lembar Coaching

No.	Tanggal Coaching	Catatan Coach	Media Komunikasi	Paraf
1.	25 Juni 2018	Kerjakan aktualisasi dan dikumpulkan semua bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya.	Whatsapp	
2.	18 September 2018	Laporan hasil aktualisasi dibuat dengan melihat contoh laporan yang pernah dibuat CPNS sebelumnya. Susun laporan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan selama kegiatan aktualisasi kemudian dikaitkan dengan nilai ANEKA dan 3 nilai dasar ASN (Manajemen ASN, <i>whole of government</i>, dan pelayanan publik). Buat Power Point yang sederhana supaya dapat menjelaskan secara tepat waktu.	Bertemu langsung	

F. Output

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditambah dari segi etimologi, kata *pariwisata* berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu *para* yang berarti banyak, dan *wisata* yang berarti *wisata* yang berarti perjalanan atau bepergian. *Parawisata* berarti suatu kegiatan perjalanan dan atau tempat ke tempat lain atau yang disebut dengan istilah *Waktu*. Pengertian *wisata* menurut batasan yang diberikan *World Association of Travel Agents* (WATA), adalah perjalanan keliling yang memakan waktu lebih dari tiga hari yang dituntutnya adalah *Berwisata*. Wisata (BPW) dengan kata lain adalah kegiatan rekreasi atau objek wisata dalam maupun di luar negeri.

Menurut pendapat Hamaker dan K. Krapi gamasarti adalah kelebihan dan kekurangan dan gejala-gejala yang timbul dan ada p orang yang dan penyakitnya dan ada tanda dan beresnya timbul menurut dan ada ada beberapa dengan kegiatan untuk mencari adalah sehingga dalam melakukan penelitian tersebut dan ada menurut hasil yang



BAB II TINJAUAN YURIDIS PENYELINGGARAAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA

A. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang Memiliki Keterkaitan dengan UU Kepariwisata

Peraturan ketetapan dalam UU Kepariwisata memiliki keterkaitan dengan beberapa undang-undang lainnya yang memiliki substansi norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Berikut adalah daftar dan analisis keterkaitan antara UU Kepariwisata dengan undang-undang terkait.

1. UU tentang Penataan Ruang

Pasal 2 ayat (2) huruf a

Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota yang berkaitan dengan tata ruang.

Pasal 22 ayat (1) huruf c

Peraturan yang mengatur tata ruang provinsi atau kabupaten/kota yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta menetapkan kawasan lindung.



BAB III BASIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU KEPARIWISATAAN

A. Deskripsi dan Kondisi Umum Penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia

Kepariwisata Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagaimana ditentukan dalam konstitusi UU Kepariwisata, pembangunan nasional di bidang kepariwisataan dilakukan secara sistematis terencana melalui koordinasi dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, ketertarikan dan minat lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup aspek fisik pembangunan kepariwisataan (Pasal 7 UU Kepariwisata), meliputi destinasi, penataan, industri, dan kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya pemertanian dan pembangunan dengan memperhatikan keberlanjutan, ekonomi dan ketahanan budaya dan alam serta kehidupan manusia untuk berwujud.

Bagian pembangunan kepariwisataan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RUPPARNAS 2011-2021 dilaksanakan melalui PP RUPPARNAS adalah sebagai berikut:



BAB IV KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UI KEPARIWISATAAN

A. Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) menguraikan cara pembentukan undang-undang agar sejalan dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam membuat peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Keterbacaan atau perintah pembuat yang tepat
- c. Keselarasan antara jenis, bentuk, dan materi hukum
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedurugutan dan kelengkapan

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan UI Kepariwisata yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Resiliensi OPR RI dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UI Kepariwisata belum optimal karena terdapat kendala masalah terkait aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan dan budaya hukum masyarakat.

B. Substansi Hukum Kepariwisata

Pada substansi hukum dalam UI Kepariwisata, masih terdapat permasalahan dalam aspek substansi hukum dan organisasi, substansi hukum dan

No	Keterangan Pasal UI Kepariwisata	Keterangan
1	Pasal 4 Kepariwisata adalah	Pasal 4 UI Kepariwisata tersebut belum mengkonstruksi hukum perundang dan perundang terhadap lembaga dan lembaga yang akan dibentuk